

ABSTRAK

Masalah waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi pokok bahasan dalam hukum Islam, karena rentan terhadap konflik/perselisihan dalam masyarakat akibat perpecahan yang dianggap tidak adil atau pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya, tidak semua sengketa hanya dapat dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan. Dalam penulisan tesis ini, penulis membahas Alternatif Penyelesaian Sengketa pembagian warisan melalui praktik musyawarah ahli waris. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang muncul di masyarakat, umumnya mengenai pembagian harta warisan, yang terkadang menimbulkan perselisihan antara ahli waris dengan jumlah harta warisan yang tidak sedikit jumlahnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dilakukan berdasarkan penelitian yang disusun secara sistematis dan terkontrol atas dasar empiris yang diperoleh dari masyarakat.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban bahwa masyarakat Desa Ngagel memilih untuk menyelesaikan sengketa warisya melalui musyawarah ahli waris dibandingkan dengan menyelesaikan di pengadilan karena masyarakat tidak percaya dengan citra pengadilan dan biayanya yang tidak sedikit. Pelaksanaan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa waris pertama-tama diselesaikan diantara para ahli waris yang dipimpin salah satu ahli waris yang disepakati, kemudian jika tidak ada jalan keluar diselesaikan oleh pemerintah Desa Ngagel. Namun dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan musyawarah terdapat kendala-kendala yaitu ketidak hadirannya para pihak dalam musyawarah, keterbatasan pengetahuan dan pendidikan, sifat pada manusuanya yang adakalanya tidak mau mengalah dan ketidak jelasan ahli waris.

Kata Kunci: sengketa waris, penyelesaian sengketa, musyawarah

ABSTRACT

The issue of inheritance is a very important issue and has always been the main point of discussion in Islamic law, because it is vulnerable to conflicts/disputes in society as a result of divisions that are considered unfair or parties who feel disadvantaged. Basically, not all disputes can only end up being taken to court to resolve them. In writing this thesis, the author discusses alternative dispute resolution for inheritance distribution through the practice of deliberation on heirs. This is due to the problems that arise in society, generally regarding the distribution of inheritance, which sometimes causes disputes between heirs with a number of inheritance that is not small in number.

This research is a type of field research using qualitative methods, the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. Methods of data collection by means of interviews and documentation. The research location is Ngagel village, Dukuhseti sub-district, Pati district. The approach used is sociological juridical which is carried out based on research that is arranged systematically and controlled on an empirical basis obtained from the community.

The results of this study obtained the answer that the people of Ngagel village chose to resolve inheritance disputes through deliberation of heirs compared to settling in court because the community did not believe in the image of the court and the costs were not small. The implementation of deliberations in resolving inheritance disputes is first resolved among the heirs led by one of the agreed heirs, then if there is no solution it is resolved by the Ngagel village government and given a peace agreement. However, in implementing the settlement of inheritance disputes by deliberation there are obstacles, namely the absence of the parties at the deliberation, limited knowledge and education, the nature of the human being who sometimes does not want to budge and the unclear heirs.

Keywords: *inheritance disputes, dispute resolution, deliberations*